

KENYAMANAN PENGGUNAAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

CONVENIENCE OF USE OF AID TOOL FOR DISABILITIES

Andayani Listyawati¹ dan Ani Mardiyati²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI, Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta Indonesia email: andayani307@yahoo.com dan animardiyati35@gmail.com

Abstrak

Penyandang disabilitas sebagaimana layaknya warga pada umumnya menginginkan dapat beraktivitas secara mandiri tetapi berbagai keterbatasannya harus menggunakan alat bantu. Kenyataannya tidak semua penyandang disabilitas merasa nyaman menggunakan alat bantu.. Kajian ini bertujuan mengetahui kenyamanan penyandang disabilitas dalam menggunakan alat bantu. Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumen. *Focus Group Discussion* (FGD) juga digunakan untuk menambah masukan dan sebagai konfirmasi. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif, adapun data kualitatif dianalisis secara kualitatif *interpretative*. Hasil penelitian menunjukkan, sebagian besar (87%) penyandang disabilitas menyatakan nyaman menggunakan alat bantu dan hanya sebagian kecil (13%) merasa tidak nyaman menggunakan alat bantu dengan alasan, seperti ukuran alat tidak proporsional dengan ukuran tubuh, kualitas bahan alat mudah rusak, sarana dan prasarana aksesibilitas kurang memadai sehingga terkadang alat bantu tidak dipakai. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Rehabilitasi Sosial adalah agar dalam memberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas dilaksanakan *asesmen* terlebih dahulu untuk mempertimbangkan faktor kesesuaian antara calon pemakai dengan ukuran alat. Selain itu rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui balai rehabilitasi agar membuat bengkel ortopedi.

Kata kunci: kenyamanan; alat bantu; penyandang disabilitas

Abstract

Persons with disabilities as well as citizens in general want to be able to move independently because with various limitations must use tools. In fact, not all people feel comfortable using aids for various reasons. This study aims to determine the comfort of persons with disabilities in using assistive devices. This research is descriptive quantitative-qualitative through questionnaire techniques, interviews, Focus Group Discussion (FGD), observation and documentation studies to uncover the data which is then analyzed using qualitative interpretative. The results showed that not all people feel comfortable using aids for various reasons, such as the size of the tool is not proportional to body size. Recommendations are addressed to the Ministry of Social Affairs cq the Directorate of Social Rehabilitation so that in providing assistance for persons with disabilities the assessment is carried out first to consider the suitability factor between the potential user and the size of the tool. In addition, recommendations are also addressed to local governments through rehabilitation centers in order to allocate funds to make orthopedic workshops.

Keywords: comfort; device; people with disabilities

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya semua manusia mempunyai harapan memiliki keturunan normal tetapi ada sebagian manusia yang mempunyai keturunan penyandang disabilitas. Permasalahan penyandang disabilitas tampak semakin kompleks dan menuntut penanganan secara serius. Susenas 2018 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 37.138.518 juta jiwa atau sekitar 14,06 persen dari jumlah penduduk Indonesia (Rini Kustiani, 2019). Angka ini diprediksi terus bertambah setiap tahunnya. Penyandang disabilitas relatif cukup banyak di Indonesia membuat keprihatinan ditengah peningkatan program kesehatan bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa kedisabilitasan berkait dengan tingkat kerentanan kesehatan.

Penyandang disabilitas mempunyai hak setara dengan warganegara lainnya. Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan tentang persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik, serta memberikan perlindungan dan persamaan hak kepada penyandang

disabilitas dengan menerbitkan berbagai peraturan pengadaan dan prasarana yang berkaitan dengan penyandang disabilitas (Hendra Arif, 2008). Undang-undang Nomor 39 ayat (2) pasal 41 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Hak penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan serta bantuan sosial. Berkait dengan kesamaan hak penyandang disabilitas telah ditegaskan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Diskriminasi yang dirasakan para penyandang disabilitas dapat menghambat proses penyesuaian diri. Pada umumnya penyandang disabilitas masih terbatas keikutsertaannya dalam memperoleh akses terhadap fasilitas serta layanan publik, misalnya dibidang pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan. Para penyandang tersebut ditengarai masih terinklusi dari lingkungan sosial. Penyandang disabilitas setidaknya

terpenuhi kebutuhan dasarnya secara fisik, psikis, dan sosial.

Penyandang disabilitas memerlukan dan menggunakan alat bantu untuk mempermudah menjalankan aktivitas. Pemakaian alat bantu hakikatnya untuk membantu: (1) meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dasar (2) memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu yang berguna dalam membantu mobilitasnya (Kementerian Sosial, 2019). Alat bantu sangat penting karena dibutuhkan penyandang disabilitas, namun tidak setiap penyandang mampu memfasilitasi dirinya dengan alat bantu. Ada sebagian penyandang karena keterbatasan ekonomi tidak mampu menyediakan alat bantu. Oleh karena itu, pemerintah turun tangan dengan menganggarkan pengadaan alat bantu. Kondisi ini diperkuat dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2017 tentang bantuan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas peserta jaminan kesehatan sosial.

Kenyataan empirik memperlihatkan tidak semua penyandang

disabilitas menyatakan merasa nyaman menggunakan alat bantu. Ada sebagian penyandang yang menyatakan merasa tidak nyaman menggunakan alat bantu. Beberapa alasan penyandang tidak menggunakan alat bantu, antara lain: tidak sesuai dengan kondisi tubuh, malu, tidak percaya diri dengan penampilan atau alat mudah rusak. Hal ini tentunya akan menghambat kemandirian penyandang. Hakikat alat bantu dibuat untuk membantu atau memberi kemudahan penyandang disabilitas agar dapat beraktivitas terutama pada disabilitas fisik, netra dan sensorik. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa alat bantu digunakan hakikatnya untuk mendukung atau membantu penyandang disabilitas beraktivitas dan kedepannya dapat menjalankan fungsi sosial. Alat bantu yang dipakai penyandang disabilitas disesuaikan dengan kedisabilitasnya dan kenyamanannya, seperti pemakaian kursi roda, tangan atau kaki palsu, tongkat dan alat bantu lainnya. Kenyamanan menggunakan alat bantu perlu diperhatikan agar penggunaannya yaitu penyandang disabilitas dapat melakukan kegiatan tanpa terbebani perasaan tertekan atau kesakitan. Senada hal tersebut, menurut Tamba Jefri (2016)

mengungkapkan kenyamanan berkait dengan aksesibilitas kehidupan penyandang disabilitas yang dititikberatkan pada fasilitas umum. Kriteria aksesibilitas berupa kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian. Mengingat pentingnya alasan menggunakan alat bantu ditinjau dari aspek kenyamanan bagi penyandang disabilitas, maka perlu

penyandang disabilitas? dan bagaimana persepsi pendamping, pekerja sosial dan pengelola BRTPD terhadap kenyamanan penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kenyamanan penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan untuk mengetahui persepsi pendamping, pekerja sosial, pengelola BRTPD terhadap kenyamanan penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai masukan kepada Kementerian Sosial berkait dengan kenyamanan penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas agar dapat menjalankan aktivitasnya secara mandiri.

METODE

Kenyamanan Penggunaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas

ada kajian untuk mengungkap alasan penyandang sehingga tidak menggunakan alat bantu. Atas dasar itu, dilaksanakan penelitian kenyamanan penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Permasalahan yang diungkap adalah bagaimana kenyamanan penggunaan alat bantu bagi

merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.. Penelitian ini mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif (Sugiyono, 2015). Lokasi penelitian di BRTPD (Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas) Yogyakarta, ditentukan secara *purposive* dengan alasan menjadi salah satu balai rehabilitasi penyandang disabilitas dengan kedisabilitasan kompleks milik pemerintah daerah. Sebagai institusi pemerintah daerah maka segala penganggaran menjadi tanggungjawab pemerintah. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk penerima manfaat dalam rangka mengetahui

identitas, macam alat bantu dan alasan kenyamanan atau ketidaknyamanan menggunakan alat. Pendalaman dilakukan menggunakan panduan wawancara baik kepada pengelola balai, pendamping, pekerja sosial maupun sebagian penerima manfaat. Observasi, untuk mengetahui kondisi balai dan aksesibilitas yang dimanfaatkan penyandang disabilitas, seperti jalan di lingkungan balai, ruangan ataupun kamar mandi. Studi dokumen untuk mengungkap ruang lingkup keberadaan balai dan merupakan penerima manfaat dengan kedisabilitasan kompleks sebagai penerima manfaat menggunakan alat bantu merupakan penyandang disabilitas daksa, netra, dan ruwi (rungu wicara). Untuk memperkaya analisis juga diperoleh informan sebanyak 10 orang terdiri dari pendamping penerima manfaat sebanyak tiga (3) orang, pekerja sosial sebanyak dua (2) orang dan pengelola BRTPD sejumlah lima (5) orang. Data yang bersifat kuantitatif dianalisa menggunakan statistik deskriptif berupa penyajian data dalam bentuk tabel, seperti identitas responden yaitu usia dan jenjang pendidikan. Sebagaimana A. Mukson (2019) data kuantitatif dapat dianalisa secara statistik deskriptif untuk

penerima manfaat. Dalam rangka melengkapi dan konfirmasi data dilaksanakan FGD dengan meminta masukan dari pengelola balai, pendamping atau pekerja sosial yang menangani aktivitas keseharian penyandang disabilitas. Unsur akademisi yang mendalami kedisabilitasan juga dilibatkan dalam memberikan masukan berkait kenyamanan penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Sumber data ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu sejumlah 60 orang, mengetahui kecenderungan hasil penelitian dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Data bersifat kualitatif dianalisa secara kualitatif melalui interpretative terhadap aspek kenyamanan dari pemakaian alat bantu penerima manfaat yang dilakukan dengan cara mereduksi data sesuai dengan tujuan penelitian. Model analisa tersebut mengacu pada analisa Miles dan Huberman (1994) yang dikenal dengan model interaksi yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

BRTPD yang berlokasi di Pundong merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang memberikan penyantunan dan rehabilitasi sosial milik pemerintah daerah. BRTPD menyantuni dan merehabilitasi penyandang disabilitas dengan kedisabilitasan kompleks, yaitu daksa, netra dan rungu wicara. Sebagai balai rehabilitasi bertujuan agar penerima manfaat mampu mandiri dan mampu melaksanakan fungsi sosial walaupun mengalami kedisabilitasan. Oleh karena itu, dengan alat bantu yang digunakan diharapkan penerima manfaat mampu beraktivitas yang didukung dengan aksesibilitas di BRTPD.

Alat bantu bagi penyandang disabilitas hakikatnya sangat diperlukan karena dipergunakan sebagai upaya memberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Melalui alat bantu diharapkan penyandang disabilitas mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Penyandang disabilitas merupakan individu yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka terkadang mengalami hambatan di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Permasalahan tersebut direspon oleh beberapa penemu alat

bantu untuk bisa menciptakan teknologi yang dapat menunjang kehidupannya sehari-hari, seperti disampaikan Sista Noor Elvina (2018) (<https://www.idntimes.com/tech/trend/sista-noor-elvina/penemuan-teknologi-untuk-disabilitas-c1c2>). Sebagian penyandang disabilitas mempunyai mobilitas cukup tinggi dan beragam, sehingga alat bantu diperlukan untuk menunjang aktivitas. Alat bantu penyandang disabilitas yang beragam dapat membantu melakukan fungsi sosial. Keberfungsian sosial merujuk pada kemampuan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dan sistem sosial serta jaringan sosial dalam memenuhi/ merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial serta menghadapi goncangan dan tekanan (baik sosial, ekonomi, budaya dll) (Edi Suharto, dkk, 2005). Indikator keberfungsian sosial, meliputi (1) Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, (2) Kemampuan memecahkan masalah, dan (3) Kemampuan menjalankan peran-peran sosial (Kementerian Sosial RI, 2018). Konsep demikian sejalan dengan prinsip pekerjaan sosial yaitu menolong orang agar orang itu bisa menolong dirinya sendiri (*“to help people to help themselves”*) (Alghi Fari Smith, 2017).

Keberfungsian sosial penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan. Hal tersebut telah didasari regulasi yang termaktub dalam konvensi hak penyandang disabilitas sebagaimana Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 yaitu sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak kaum disabilitas di seluruh Indonesia. Keberfungsian sosial juga merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri, artinya walaupun sebagai penyandang tetapi mampu melakukan sesuatu hal seperti yang dilakukan orang lain. Penyandang disabilitas hakikatnya mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Mereka mampu beraktivitas walaupun menggunakan sarana alat bantu. Kebutuhan aktualisasi diri mengacu pada teori yang dikemukakan Maslow tentang hierarki kebutuhan dasar manusia, seperti (1) kebutuhan fisiologis, (2) keamanan, (3) kebutuhan cinta, sayang, dan kepemilikan, (4) kebutuhan esteem (Feist, 2014).

Berkait dengan permasalahan tentang kenyamanan penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas,

disabilitas merupakan bagian dari hak responden penelitian ini sejumlah 60 orang terdiri dari 36 orang laki-laki (60%) dan perempuan berjumlah 24 orang (40%) dengan klasifikasi usia sebagai berikut.

Tabel 1
Kategori Usia Responden

No	Kategori usia/tahun	Jumlah	Persentase
1	<17	2	3,33
2	17-22	8	13,33
3	23-28	14	23,33
4	29-34	10	16,67
5	>35	26	43,34
Total		60	100

Sumber: data primer 2019

Berdasar data di atas mengilustrasikan dari 60 orang yang menjadi responden berdasar kategori usia mayoritas merupakan usia muda/dewasa yaitu di atas 17 tahun namun demikian disetiap kelompok usia menunjukkan jumlah bervariasi. Responden berusia di atas 35 tahun adalah sebanyak 26 orang (43%) dan selebihnya adalah responden berusia kurang dari 35 tahun sebanyak 34 orang (57%). Kelompok usia 17 -34 tahun jumlahnya relatif seimbang. Kelompok usia di bawah 17 tahun jumlahnya sedikit hanya sebanyak 2 orang (3,33%), sedangkan kategori usia 17-22 tahun sebesar 8 orang (13,33%), Usia 23-28

tahun sebesar 14 orang (23,33) orang (43,34%). Kondisi tersebut menyiratkan bahwa para penyandang disabilitas (penerima manfaat) merupakan kelompok usia muda yang mengalami kedisabilitas. Kondisi kedisabilitas ini membuat mereka menggunakan alat bantu untuk menunjang aktivitas. Mengenai sebaran katagori usia tersebut mengacu pada persyaratan usia penyandang disabilitas yang mengikuti bimbingan di balai rehabilitasi.

Adapun pendidikan responden menunjukkan relatif bervariasi, karena apabila disimak terhadap kategori usia diasumsikan pernah mengikuti pendidikan formal yang mana jumlah setiap kategori jenjang pendidikan jumlah responden menunjukkan variasi pula. Sebagaimana dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Kategori Jenjang Pendidikan Responden

No	Kategori Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah	2	3,33
2	SD	27	45
3	SMP	16	26,67
4	SMA	14	23,33
5	Perguruan Tinggi	1	1,67
	Total	60	100

Sumber: data primer 2019

Data tabel 2 di atas menunjukkan, bahwa 60 responden berdasar tingkat

dan kategori usia 29-34 tahun sejumlah pendidikan cukup bervariasi yaitu dari kategori tidak sekolah hingga perguruan tinggi. Hasil rekapitulasi data mayoritas pendidikan informan adalah SD, adapun yang mampu menyelesaikan pendidikan setingkat SMP dan SMA jumlahnya berimbang. Informan berpendidikan SD sebesar 27 orang (45%), SMP sebesar 16 orang (26,67%), 14 orang (23,33%) berpendidikan SMA, satu orang (1,67%) menyelesaikan PT, dan dua orang (3,33%) tidak sekolah. Kondisi pendidikan responden sebatas dalam tataran rendah dan menengah, yaitu setingkat SD, SMP, dan SMA setelah dirunut melalui wawancara diketahui sebagian besar disebabkan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan.

Responden penerima manfaat BRTPD dilihat dari tingkat pendidikan dalam tataran pendidikan rendah dan menengah yang diperlihatkan dengan mayoritas sebatas pada tingkat SD dan sebagian di tingkat SMP dan SMA bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan formal namun demikian salah seorang responden berpendidikan tinggi. Merujuk pada persyaratan untuk

mengikuti rehabilitasi di balai batasan pendidikan memang menjadi salah satu prasyarat. Tingkat pendidikan seseorang dapat dipengaruhi kemampuan ekonomi keluarga, namun terkadang latar belakang ekonomi keluarga terbataspun seseorang mampu menyelesaikan, artinya keluarga terbatas ekonominya dapat menyekolahkan anak hingga mencapai pendidikan yang tinggi. Berkait dengan responden penerima manfaat melalui wawancara terungkap, bahwa pada umumnya mereka berasal dari keluarga berekonomi menengah ke bawah, seperti yang diungkap salah seorang penerima manfaat.

“Orang tua saya bekerja sebagai petani berpenghasilan terbatas untuk makan sekeluarga, tetapi selalu mendorong agar anaknya bisa sekolah tinggi. Hal itu mendorong saya mengumpulkan biaya dengan bekerja untuk biaya pendidikan, tetapi karena kecelakaan kerja menyebabkan saya menjadi cacat seperti ini. Apabila akan melanjutkan sekolah lebih tinggi orang tua merasa tidak sanggup membiayai, sehingga berbekal ijazah SMA saya mencoba melamar pekerjaan”

Berkait dengan responden di BRTPD yang mempunyai disabilitas kompleks dan menggunakan alat bantu dalam memperlancar aktivitas. Macam alat bantu diklasifikasi berdasar jenis meliputi alat bantu sensorik netra, sensorik tuli, dan fisik. Jenis alat bantu sensorik netra: reglet, kacamata, tongkat+reglet pen, tongkat+jam tangan bicara+reglet pen, tongkat, kacamata+tongkat. Jenis alat bantu sensorik rungu wicara: hearing aid/ABD. Jenis alat bantu fisik: kruk, kaki palsu/prothese kaki, tangan palsu, kursi roda, walker, sepatu ortopedi, tongkat, penggendong tangan/arm sling el bow kruk, korset, kruk, bre, prothese, tongkat dan kursi roda (Soetji Andari dkk, 2019).

Berdasarkan hasil penelusuran wawancara yang selanjutnya direkapitulasi terungkap tentang penggunaan alat bantu semua responden menjawab sangat diperlukan dan bermanfaat.

“Sebagaimana yang dikemukakan salah seorang responden, menyatakan alat bantu sangat bermanfaat dipergunakan untuk membantu melakukan aktivitas saya.”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh penyandang lain terutama bagi

penyandang dengan tingkat kedisabilitasan berat penggunaan alat bantu sangat bermanfaat dan membantu beraktivitas. Sebagaimana halnya penggunaan alat bantu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dasar. Alat bantu digunakan untuk mendukung mobilitas dalam rangka pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Keberhasilan penggunaan alat bantu adalah meningkatnya kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dasar melalui pemberian alat bantu, penyandang disabilitas meningkat kemampuan mobilitasnya dan dalam mengakses hak dasar (<https://intelresos.kemsos.go.id>).

Alat bantu dapat dimaknai sebagai aksesibilitas untuk memberi kemudahan yang didukung sarana dan prasarana. LB Wirawan (1997) mensyaratkan empat azas dalam aksesibilitas, yaitu adanya kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian. Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, sebagaimana diungkapkan M. Syafi'ie (2014).

Data yang diperoleh dari wawancara memperlihatkan tidak semua responden merasa nyaman menggunakan alat bantu walaupun alat tersebut tetap dipakai karena tanpa alat bantu menjadi kurang maksimal dalam beraktivitas. Lebih lanjut melalui aktivitas dapat mendukung fungsi sosial penyandang baik di lingkungan balai, keluarga, maupun lingkungan masyarakat sekitar.

Aspek kenyamanan merupakan sesuatu hal mendasar karena melalui perasaan nyaman akan membuat seseorang menjalani kehidupan menjadi tenang. Perasaan nyaman menggunakan alat bantu juga menjadi salah satu hak penyandang disabilitas sebagaimana setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan (Muladi, 2009). Secara konseptual kenyamanan (*comfort*) lebih cenderung pada penilaian individual dan holistik. Kolcaba mengilustrasikan bahwa teori kenyamanan bertujuan meningkatkan rasa nyaman kelayan (Herlina, 2019). Kondisi tersebut sebagai keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Teralisirnya perasaan nyaman akan mampu membuat perasaan sejahtera pada individu. Potter dan Perry yang dikutip Iqbal Mubarak dan Indrawati

Susanto (2015) menyatakan rasa nyaman merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan ketenteraman (kepuasan yang dapat meningkatkan penampilan sehari-hari), kelegaan (kebutuhan yang telah terpenuhi), dan *transend*. Kenyamanan dipandang secara holistik mencakup empat aspek, (1) fisik berhubungan sensasi tubuh, (2) sosial berhubungan dengan interpersonal, keluarga, dan sosial, (3) psikospiritual berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri seorang yang meliputi harga diri, seksualitas dan makna kehidupan, (4) lingkungan berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti cahaya, bunyi, temperatur, warna, unsur dasar lainnya.

Demikian juga pada perasaan kenyamanan yang dirasakan penyandang disabilitas dalam menggunakan alat bantu. Responden sebanyak 60 orang terdiri penyandang disabilitas fisik dan sensorik penerima manfaat memperlihatkan, sebagian besar yaitu 52 orang (87%) penyandang disabilitas menyatakan merasa nyaman menggunakan alat bantu dan sejumlah 8 orang (13%) merasa tidak

nyaman dengan alat bantu yang dipakai. Alasan kenyamanan yang dikemukakan 87 persen responden karena (1) ukuran alat bantu proporsional dengan ukuran pemakai, misalnya kursi roda sesuai dengan tubuhnya sehingga nyaman dipakai beraktivitas, (2) alat bantu mempunyai kualitas bahan baik, kokoh dan tidak mudah rusak, misalnya kruk atau tongkat terbuat dari bahan yang baik, (3) alat bantu yang dipakai dapat memudahkan dalam melaksanakan aktivitas dan menjangkau di lingkungan balai sehingga belajar mandiri. Sementara ketidaknyamanan yang dirasakan oleh 13 persen responden dalam menggunakan alat bantu juga berdasarkan beberapa alasan. , seperti (1) ukuran alat tidak sesuai dengan proporsi tubuh, (2) kualitas bahan kurang baik, (3) sarana dan prasarana aksesibilitas kurang memadai (4) penyandang disabilitas belum *familiar* terhadap alat yang digunakan. Untuk mengetahui aspek kenyamanan dan ketidaknyamanan menggunakan alat bantu diklasifikasi pada matrik yang dapat disimak di bawah ini.

Tabel 3
Aspek Kenyamanan dan
Ketidaknyamanan Menggunakan Alat Bantu

No.	Aspek Kenyamanan	Aspek Ketidaknyamanan
1	Ukuran alat bantu sesuai dengan proporsi tubuh dan kedisabilitas	Ukuran alat bantu tidak sesuai dengan proporsi tubuh dan kedisabilitas, seperti alat bantu dengar, kursi roda atau kaki dan tangan palsu.
2	Kualitas bahan alat bantu baik	Kualitas bahan alat bantu kurang baik sehingga mudah rusak, seperti alat bantu dengar tidak berfungsi (mendengung), onderdil kursi roda mudah rusak.
3	Alat bantu dapat digunakan memudahkan aktivitas	Sarana dan prasarana untuk aksesibilitas kurang memadai dan terbatas walaupun dengan alat bantu, seperti jalan tidak rata dan pintu tidak otomatis (masih bersifat manual)
4		Belum semua toilet familiar terhadap penyandang disabilitas tertentu

Sumber: data primer, 2019

Rekapitulasi terhadap perasaan ketidaknyamanan informan dalam menggunakan alat bantu seperti yang diilustrasikan di atas dapat dimaknai, bahwa faktor ketidaknyamanan menggunakan alat bantu menjadi kendala dalam menjalankan aktivitas bahkan menjadi tidak maksimal, seperti ukuran alat bantu yang tidak sesuai dengan proporsi tubuh dan kedisabilitas. Salah seorang responden yang menggunakan alat

bantu dengar menyatakan bentuk ketidaknyamanan adalah alat dengar mendengung. Pernyataan ini disampaikan juga oleh dua orang informan(pendamping) yang menyatakan alasan hampir sama, yaitu:

“sering sekali alat yang dipakai rusak dan berbunyi atau mendengung, menyebabkan telinga sakit sehingga merasa tidak nyaman memakainya. Kalau sudah begitu alat bantu tidak dipakai dan lebih memperhatikan bahasa isyarat untuk berkomunikasi”.

Kondisi demikian juga terjadi pada salah satu penerima manfaat yang memakai alat bantu *Kruk* karena kaki diamputasi akibat kecelakaan kerja, menuturkan:

“Apabila memakai kaki palsu rasanya sakit dan terkadang mlicet (luka) malahan lebih nyaman memakai kruk”

Penerima manfaat yang menggunakan kursi roda mengungkapkan ketidaknyamanan memakai alat bantu karena ukurannya terlalu besar dan kurang sesuai dengan proporsi tubuh. Demikian juga penuturan salah seorang penerima manfaat yang terpaksa

diamputasi tangannya karena suatu penyakit kronis mengatakan: *tangan palsu saya jarang dipakai karena kalau dipakai malahan tidak nyaman dan terkadang menyebabkan sakit, tetapi nyaman tidak memakai alat bantu tangan dan saya bisa melakukan kegiatan walaupun terbatas. Jadi alat bantu tidak selalu dipakai."*

Sementara itu apabila ditemukan alat rusak tidak bisa langsung diperbaiki atau ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan balai belum mempunyai bengkel khusus perbaikan alat bantu. Perbaikan alat bantu yang rusak dibawa ke bengkel di luar balai sehingga proses perbaikannya memakan waktu cukup lama. Balai selama ini melakukan perbaikan apabila ada kerusakan taraf ringan. BRTPD merupakan balai rehabilitasi pemerintah daerah maka segala bentuk operasionalisasi harus sesuai dengan SOP (*Standard Operasional Procedur*) yang telah ditentukan. Semua kegiatan dan pengadaan mengacu pada SOP dan pada umumnya terbatas. Data empirik menunjukkan, misalnya dalam pengadaan kursi roda sebelumnya tidak ada *assessment* terhadap kesesuaian kursi roda dengan bentuk tubuh penyandang, ada kemungkinan terlalu kecil atau terlalu

besar. Tangan atau kaki palsu pun apabila dipakai dengan mengindahkan *asesment* terlebih dahulu dapat mengakibatkan tidak adanya rasa sakit.

Alat bantu dengar yang dipakai setidaknya pada awalnya dilakukan latihan dalam rangka menyesuaikan dengan alat. Sebagaimana diungkapkan Fitri Haryanti Harsono, bahwa pemasangan alat bantu dengar dilaksanakan tes terlebih dahulu, apakah sudah sesuai dengan fungsi yang diharapkan penyandang disabilitas atau tidak (liputan6.com/health/read/4042182/penyandang-disabilitas-sulit-peroleh-alat-bantu-dari-pemerintah). Sementara itu sebanyak dua orang (14,28%) dari 13 persen penerima manfaat yang merasa tidak nyaman memakai alat bantu. Khususnya yang memakai alat bantu dengar karena berbunyi atau mendengung sehingga terkadang alat tidak dipakai dan komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Hal ini merupakan bukti, penyandang merasa tidak nyaman menggunakan alat bantu. Sejatinya menggunakan alat bantu akan membuat penggunanya merasa nyaman dan senang seperti yang diungkap dari pendapat Kolcaba, seperti di atas. Hal tersebut tidak bisa disamakan karena alasan tertentu menyebabkan sebagian kecil penerima

manfaat merasa menggunakan alat bantu tidak nyaman.

Penerima manfaat memerlukan aksesibilitas dalam beraktivitas di lingkungan balai bahkan kelak apabila sudah menyelesaikan rehabilitasi. Hasil observasi menunjukkan salah satu yang menjadi kendala, misalnya pintu yang menghubungkan antar ruang di balai belum otomatis dan masih manual. Hal tersebut *Pintu yang menghubungkan antar ruang di balai masih manual sehingga kadang-kadang kalau tidak hati-hati bisa terbentur diharapkan dapat diganti dengan pintu otomatis supaya lebih aman terutama bagi penyandang disabilitas”.*

Penuturan pengelola balai terungkap sewaktu dilaksanakan FGD, bahwa keberadaan pintu yang menghubungkan antar ruang masih manual sehingga apabila tidak berhati-hati pada waktu membuka atau menutup dapat mengenai tubuh (*Jawa=natap*). Hal ini terutama berdampak pada penyandang tuna netra. Permasalahan tersebut tampak pada saat observasi dilaksanakan.

Kondisi toilet belum familiar bagi penerima manfaat yang bervariasi jenis kedisabilitasannya. Ada sebagian penerima manfaat dengan kedisabilitasannya tertentu terkadang mengalami kesulitan. Hal ini

juga dipertegas oleh pendamping, yang mendampingi penerima manfaat pada saat beraktivitas, bahwa posisi pintu yang masih manual merupakan kendala bagi penyandang beraktivitas. Kondisi ini berpengaruh pada saat lalu lalang pengguna sehingga menyebabkan kurang nyaman. Permasalahan ini juga diperkuat sebagaimana yang dikemukakan pekerja sosial yang menyatakan

setidaknya ada wacana untuk dilaksanakan pembenahan agar memudahkan penyandang disabilitas menggunakan toilet, seperti toilet yang tidak memberi tekanan pada lutut untuk bangkit berdiri (*natural body movement*), hal ini senada seperti yang dikemukakan oleh Sista Noor Elvina (2018) (<https://www.idntimes.com/tech/trend/sista-noor-elvina/>)

Pendalaman FGD juga terungkap, bahwa alat bantu bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas. Kenyamanan menggunakan alat bantu memang sangat diharapkan penggunaannya, namun beberapa alasan menyebabkan menggunakan alat bantu membuat kurang nyaman, seperti bahan kurang standard sehingga mudah rusak. Ada beberapa hal yang ditengarai menjadi penyebab ketidaknyamanan menggunakan alat bantu seperti telah

diilustrasikan di atas. Penerima manfaat memperoleh alat bantu berasal dari keluarga (mandiri) atau pemerintah. Alat bantu dari pemerintah diterima atas dasar pengajuan yang telah disetujui dan berdasar pada kuantitas jadi tidak secara detail pada ukuran. Hakikatnya setiap penyandang disabilitas mempunyai karakteristik kondisi fisik berlainan dan hal tersebut kadang terabaikan. Kedepannya dalam rangka pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas sebelumnya dilaksanakan pengukuran terlebih dahulu. Hal ini untuk meminimalisir apabila terjadi ketidaksesuaian yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna. Upaya ini tentu diselaraskan dengan kemampuan pemerintah karena selama ini capaiannya target kuantitas bukan kualitas.

Hasil wawancara dengan pendamping berkait dengan kenyamanan penggunaan alat bantu penyandang disabilitas, yaitu:

“ Pemberian alat bantu penyandang disabilitas dari pemerintah dengan swasta memang berbeda. Dari pihak swasta alat yang diberikan kepada penyandang disabilitas penerima manfaat melalui prosedur cukup panjang bermula dari pemeriksaan dokter untuk menentukan penyandang memakai alat bantu ataukah tidak memerlukan kemudian diperhitungkan ukuran yang sesuai dengan kondisi fisik penyandang supaya nyaman dipakai .”

Informan dari unsur akademisi terungkap bahwa kenyamanan penggunaan alat bantu akan dirasakan penerima manfaat apabila didukung aksesibilitas baik sewaktu di lingkungan balai maupun setelah rehabilitasi. Alat bantu tetap nyaman dipakai dan *familiar* (cocok) di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat. Hal ini untuk melatih supaya mandiri dan dapat berfungsi sosial. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas baik di lingkungan rumah atau publik perlu mendapat perhatian agar bisa dijangkau sewaktu melakukan aktivitas yang sesuai dengan kedisabilitasannya.

Alat bantu perlu mendapat perawatan karena harus sesuai dengan proporsi tubuh penyandang yang bisa tumbuh dan berkembang. Sejauh ini untuk merawat atau memperbaiki alat bantu belum semua balai mempunyai bengkel ortopedi, hal ini tergantung kemampuan balai dalam menyelenggarakan. Alokasi anggaran menjadi pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan peralatan alat bantu dan peningkatan kemampuan petugas yang profesional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Atas dasar uraian hasil penelitian tentang kenyamanan menggunakan alat bantu bagi penyandang disabilitas di atas dapat disimpulkan, bahwa penggunaan alat

bantu sebagian besar penyandang disabilitas menyatakan nyaman (87%). Kenyamanan pemakaian alat bantu oleh penerima manfaat karena alat yang sesuai ukuran, kualitas yang baik dan ketersediaan sarana prasarana. Kenyamanan ini tampak pada saat melakukan aktivitas sehingga menjadi mandiri dan ke depannya diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosial. Sebagian kecil (13%) penyandang menyatakan tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman karena berbagai alasan, seperti ukuran alat tidak sesuai dengan ukuran tubuh (tidak proporsional), kualitas bahan

Kementerian Sosial cq Direktorat Rehabilitasi Sosial agar dalam memberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas dilaksanakan *asesmet* terlebih dahulu untuk mempertimbangkan faktor kesesuaian antara calon pemakai dengan ukuran alat supaya nyaman digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama melalui pihak terkait atau lembaga sosial lain yang menangani permasalahan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Kedua, pemerintah daerah melalui balai rehabilitasi agar mengalokasikan dana untuk membuat bengkel ortopedi dengan harapan apabila ada kerusakan alat bantu dapat segera ditindaklanjuti. Ketiga, balai membuka bengkel orthopedi untuk alat bantu dan

alat mudah rusak, sarana dan prasarana aksesibilitas kurang memadai sehingga terkadang alat bantu tidak dipakai. Sementara itu terkadang alat bantu dipakai walaupun belum tentu merasa nyaman karena tanpa penggunaan alat bantu dapat melakukan aktivitas walaupun terbatas. Pandangan informan bahwa pemakaian alat bantu kepada penerima manfaat perlu dilakukan *asesment* terlebih dahulu.

Berdasar kesimpulan tersebut, maka diajukan rekomendasi kepada pertama,

seyogyanya ada petugas bengkel yang profesional sesuai kompetensi dan apabila belum ada hendaknya diberi kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tentang alat bantu bagi penyandang disabilitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Disampaikan terimakasih kepada pihak yang mendukung terlaksananya penelitian ini. Kepada Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta dan segenap jajarannya yang memberikan kesempatan pada saat sebelum, proses pengumpulan data hingga penulisan laporan penelitian ini selesai dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghi Fari Smith(2017). *Prinsip-prinsip Umum Praktik pekerjaan Sosial*. rakyatpos.com/prinsip-prinsip-umum-praktik-pekerjaan-sosial.html/ diakses 30April 2020
- A. Mukhson. (2019). *Teknik Analisis Kuantitatif* diunduh di staffnew.uny.ac.id>pendidikan 20 April 2020
- Edi Suharto.(2005).*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Feist, Jess(2014). *Teori Kepribadian: Theories of personality*. Salemba: Humanika
- Fitri Haryanti Harsono. *Penyandang Disabilitas Sulit peroleh Alat Bantu dari Pemerintah*. Integrasi layanan sosialdi unduh di <https://intelresos.kemsos.go.id>>newi 10 Maret 2020
- Kementerian Sosial.(2019).*Bantuan Sosial Alat Bantu Penyandang Disabilitas.Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial
- LB Wirawan.(1997). *Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur*. Surabaya: FISIP Universitas Airlangga
- Muladi.(2009).*Hak Azasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama
- M. Syafi'ie. (2014). *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal INKLUSI Vol.1 No.2 Juli- Desember 2014
- Rini Kustiani, 2019. *Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia?* Simak data ini Diunduh di<http://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia> diunduh diLiputan6.com/health/read/4042182/penyandang-disabilitas-sulit-peroleh-alat-bantu-dari-pemerintah 23 April 2020
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, (2008).*Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta:BumiAksara
- Hendra Arif(2008). *Kajian Aksesibilitas Pada Ruang Publik Kota . Studi Kasus: Lapangan Merdeka*. Universitas Sumatera Utara
- Herlina.*Aplikasi Teori Kenyamanan Pada Asuhan Keperawatan Anak* diunduh di Library.upnvj.ac.id 13 Maret 2019
- Iqbal Mubarak dan Indrawati.2015 Pengertian Kenyamanan. Diunduh di Repository.poltekes-denpasar.ac.id diakses 17 Juni 2020
- pabanyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-data
- Tamba Jefri.(2016). *Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Brawijaya*.IJDS 2016; vol.3 no.1. Departemen ilmu Administrasi Publik, universitas Brawijaya, Malang
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soetji Andari, (2019). *Pemanfaatan Alat Bantu untuk pelayananPenyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik*.Yogyakarta:B2P3KS Press
- Sista Noor Elvina <https://www.idntimes.com/tech/trend/sista-noor-elvina/penemuan-teknologi-untuk-disabilitas-c1c2> Canggih, 10 penemuan yang Diciptakan untuk penyandang Disabilitas diunduh 20 April 2020

Sumber lain:

- Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2017 tentang bantuan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas peserta jaminan kesehatan sosial.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas